



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah telah mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai penyelesaian program kegiatan pembangunan serta penanggulangan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, dan pelaksanaannya telah diatur sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN Daerah Nomor Perj-130/SMI/0821 Tanggal 27 Agustus 2021;
- b. bahwa sebagaimana Pasal 15B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima hari) kerja sejak tanggal diajukannya permohonan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, menyatakan antara lain Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dilaksanakan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), juga membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Harjo
		

- d. bahwa Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain menyatakan bahwa pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian daerah, dan dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah tersebut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Perubahan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kahap. Par. Hukum-Indonesia	Karo
		

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4	PENDAPATAN DAERAH	4.072.305.545.344,00	4.072.305.545.344,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	1.413.292.261.344,00
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.01	Pajak Daerah	1.123.928.911.759,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.02	Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.013.284.000,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	o	h

5	BELANJA	4.428.740.158.908,74	4.980.740.158.908,74
5.1	BELANJA OPERASI	3.073.033.524.714,67	3.166.735.884.714,67
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	1.366.234.187.402,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	
	Bertambah/Berkurang	93.702.360.000,00	
	Jumlah.....	980.902.969.693,00	
5.1.03	Belanja Bunga	36.106.503.797,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.800.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	717.706.062.213,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.471.652.527,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	900.611.879.782,01	900.611.879.782,01
	Bertambah/Berkurang	458.297.640.000,00	
	Jumlah.....	1.358.909.519.782,01	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	
	Bertambah/Berkurang	17.895.700.000,00	
	Jumlah.....	149.723.000.593,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	309.797.747.134,74	
	Bertambah/Berkurang	138.301.940.000,00	
	Jumlah.....	448.099.687.134,74	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.742.035.310,52	
	Bertambah/Berkurang	287.100.000.000,00	
	Jumlah.....	699.842.035.310,52	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.325.260.001,00	
	Bertambah/Berkurang	15.000.000.000,00	
	Jumlah.....	16.325.260.001,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.008.656.316,06	8.008.656.316,06
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.008.656.316,06	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	447.086.098.096,00	447.086.098.096,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	80.000.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
Total Surplus/(Defisit)		-400.455.721.564,74	-952.455.721.564,74
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	480.615.721.564,74	1.032.615.721.564,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172.304.561.516,64	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	172.304.561.516,64	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	308.311.160.048,10	
	Bertambah/Berkurang	552.000.000.000,00	
	Jumlah.....	860.311.160.048,10	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	160.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	80.000.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
	Pembiayaan Netto	400.455.721.564,74	952.455.721.564,74
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	0,00	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perencanaan-Indangan	Karo
		

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
Pada tanggal 14 September 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.028.284.437.344,00	4.028.284.437.344,00	0,00	0,00%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	1.413.292.261.344,00	0,00	0,00%
4.1.1	Pajak Daerah	1.123.928.911.759,00	1.123.928.911.759,00	0,00	0,00%
4.1.2	Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	16.850.495.000,00	0,00	0,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	0,00	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	221.674.604.585,00	0,00	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.594.992.176.000,00	2.594.992.176.000,00	0,00	0,00%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.594.992.176.000,00	2.594.992.176.000,00	0,00	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
5	BELANJA DAERAH	4.428.740.158.908,74	4.980.740.158.908,74	552.000.000.000,00	12,46%
5.1	BELANJA OPERASI	3.073.033.524.714,67	3.166.735.884.714,67	93.702.360.000,00	3,05%

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kasubag. Pemasangan dan Pengawasan	Kiro
t	o	l

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.375.361.333.419,57	1.375.361.333.419,57	0,00	0,00%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	915.587.972.758,10	1.009.290.332.758,10	93.702.360.000,00	10,23%
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	0,00	0,00%
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00%
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	717.706.062.213,00	717.706.062.213,00	0,00	0,00%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	26.471.652.527,00	26.471.652.527,00	0,00	0,00%
5 . 2	BELANJA MODAL	900.611.879.782,01	1.358.909.519.782,01	458.297.640.000,00	50,89%
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	0,00	0,00%
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.011.242.561,75	154.906.942.561,75	17.895.700.000,00	13,06%
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	309.797.747.134,74	448.099.687.134,74	138.301.940.000,00	44,64%
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.742.035.310,52	699.842.035.310,52	287.100.000.000,00	69,56%
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.325.260.001,00	16.325.260.001,00	15.000.000.000,00	1131,85%
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.008.656.316,06	8.008.656.316,06	0,00	0,00%
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	8.008.656.316,06	8.008.656.316,06	0,00	0,00%
5 . 4	BELANJA TRANSFER	447.086.098.096,00	447.086.098.096,00	0,00	0,00%
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	0,00	0,00%
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	480.615.721.564,74	1.032.615.721.564,74	552.000.000.000,00	114,85%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172.304.561.516,64	172.304.561.516,64	0,00	0,00%
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	308.311.160.048,10	860.311.160.048,10	552.000.000.000,00	179,04%
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	400.455.721.564,74	952.455.721.564,74	552.000.000.000,00	137,84%
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00%

No	PENGOLAH	PARAF
1	Pt. KASUBBID PENYUSUNAN APBD	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BIRO HUKUM	
5	Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL GUBERNUR	
9	GUBERNUR	Mohon ditandatangani

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	480.615.721.564,74	1.032.615.721.564,74	552.000.000.000,00	114,85%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172.304.561.516,64	172.304.561.516,64	0,00	0,00%
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	308.311.160.048,10	860.311.160.048,10	552.000.000.000,00	179,04%
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	400.455.721.564,74	952.455.721.564,74	552.000.000.000,00	137,84%
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00%

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 September 2021

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
TOTAL SUMBER PEMBIAYAAN PEN					552.000.000.000,00		
1	DINAS KESEHATAN	1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.323.015.151	30.000.000.000,00	46.323.015.151,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2	BELANJA MODAL	16.323.015.151	30.000.000.000,00	46.323.015.151,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.045.465.151	15.000.000.000,00	30.045.465.151,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Alat Besar	109.660.000		109.660.000,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	109.660.000		109.660.000,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.285.782.595	15.000.000.000,00	18.285.782.595,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	321.649.998		321.649.998,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.852.162.595	15.000.000.000,00	17.852.162.595,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	111.970.002		111.970.002,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.703.229.154		8.703.229.154,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.703.229.154		8.703.229.154,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	884.394.500		884.394.500,00	
		1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	884.394.500		884.394.500,00	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag Kabag. Perencanaan dan Anggaran
Karo

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	1.972.858.902	-	1.972.858.902,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.512.800.001	-	1.512.800.001,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	460.058.901	-	460.058.901,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	89.540.000	-	89.540.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	89.540.000	-	89.540.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000	-	350.000.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000	-	350.000.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000	-	350.000.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.550.000	-	197.550.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	197.550.000	-	197.550.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	197.550.000	-	197.550.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	730.000.000	15.000.000.000,00	15.730.000.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	730.000.000	15.000.000.000,00	15.730.000.000,00	
		1.02.1.02.0.00.0-00.01.01.1.07.10.5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	730.000.000	15.000.000.000,00	15.730.000.000,00	
			JUMLAH PEN DINKES		30.000.000.000,00		
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.1.03.0.00.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	27.569.388.528	8.700.000.000,00	36.269.388.528,15	
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02.14.5.2	BELANJA MODAL	27.569.388.528	8.700.000.000,00	36.269.388.528,15	
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02.14.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.569.388.528	8.700.000.000,00	36.269.388.528,15	
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02.14.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.569.388.528	8.700.000.000,00	36.269.388.528,15	
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.02.1.02.14.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	27.569.388.528	8.700.000.000,00	36.269.388.528,15	
		1.03.1.03.0.00.0-00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

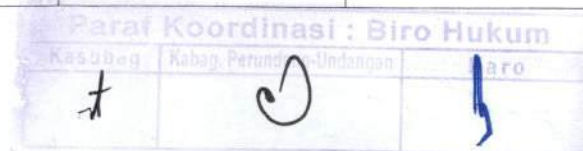
Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kiro
f	3	h

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01 . 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	5.454.018.560	1.350.000.000,00	6.804.018.560,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01 . 03 . 5 . 2	BELANJA MODAL	2.734.795.660	1.350.000.000,00	4.084.795.660,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.734.795.660	1.350.000.000,00	4.084.795.660,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jaringan	2.734.795.660	1.350.000.000,00	4.084.795.660,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 03 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.734.795.660	1.350.000.000,00	4.084.795.660,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01 . 03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	725.576.900	500.000.000,00	1.225.576.900,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01 . 03 . 5 . 2	BELANJA MODAL	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Instalasi	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 05 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01 . 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	86.693.576.247	1.000.000.000,00	87.693.576.247,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01 . 03 . 5 . 2	BELANJA MODAL	52.304.252.550	1.000.000.000,00	53.304.252.550,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.304.252.550	1.000.000.000,00	53.304.252.550,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.304.252.550	-	52.304.252.550,00	
		1.03 . 1-03.0-00.0-00.01 . 09 . 1.01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.304.252.550	-	52.304.252.550,00	



NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.09.1.01.03.5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.09.1.01.03.5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	61.131.600.331	47.800.000.000,00	108.931.600.330,84	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2	BELANJA MODAL	60.731.600.335	47.800.000.000,00	108.531.600.334,84	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.731.600.335	47.800.000.000,00	108.531.600.334,84	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	50.042.397.477	41.500.000.000,00	91.542.397.477,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	50.042.397.477	41.500.000.000,00	91.542.397.477,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.689.202.858	6.300.000.000,00	16.989.202.857,84	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.961.549.289	200.000.000,00	2.161.549.288,84	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.05.5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.727.653.569		14.827.653.569,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	236.109.269.124	221.000.000.000,00	457.109.269.124,23	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.08.5.2	BELANJA MODAL	226.109.269.124	221.000.000.000,00	447.109.269.124,23	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.08.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226.109.269.124	221.000.000.000,00	447.109.269.124,23	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.08.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	226.109.269.124	221.000.000.000,00	447.109.269.124,23	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.08.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	226.109.269.124	221.000.000.000,00	447.109.269.124,23	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	44.846.093.895	7.750.000.000,00	52.596.093.895,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12.5.2	BELANJA MODAL	44.846.093.895	7.750.000.000,00	52.596.093.895,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.846.093.895	7.750.000.000,00	52.596.093.895,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.846.093.895	7.750.000.000,00	52.596.093.895,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	-	-	0,00	
		1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.1.01.12.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	44.846.093.895	7.750.000.000,00	52.596.093.895,00	
		JUMLAH PEN DINAS PU			288.100.000.000,00		
3	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	1.04.1-04.2-10.0-00.02.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		1.04.1-04.2-10.0-00.02.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				



NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	27.771.146.225	223.532.915.685,00	251.304.061.910,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	15.870.808.304	92.000.000.000,00	107.870.808.304,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.870.808.304	92.000.000.000,00	107.870.808.304,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	15.615.613.304	92.000.000.000,00	107.615.613.304,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.615.613.304	92.000.000.000,00	107.615.613.304,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02	Belanja Jasa	50.000.000	0,00	50.000.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000	0,00	50.000.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04	Belanja Perjalanan Dinas	205.195.000	0,00	205.195.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	205.195.000	0,00	205.195.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2	BELANJA MODAL	11.900.337.921	131.532.915.685,00	143.433.253.606,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.338.590	131.532.915.685,00	134.033.254.275,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.500.338.590	126.532.915.685,00	129.033.254.275,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.500.338.590	126.532.915.685,00	129.033.254.275,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.399.999.331	0,00	9.399.999.331,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	9.399.999.331	0,00	9.399.999.331,00	
		1.04 . 1-04.2-10.0-00.02 . 05 . 1.01 . 02 . 5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	9.399.999.331	0,00	9.399.999.331,00	
		JUMLAH PEN DINAS PERKIM			223.532.915.685,00		
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
		2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 1.02 . 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	372.800.000	2.700.700.000,00	3.073.500.000,00	
		2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 1.02 . 02 . 5 . 2	BELANJA MODAL	372.800.000	2.700.700.000,00	3.073.500.000,00	
		2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 1.02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.800.000	2.700.700.000,00	3.073.500.000,00	
		2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 02 . 1.02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	372.800.000	2.700.700.000,00	3.073.500.000,00	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Kiro

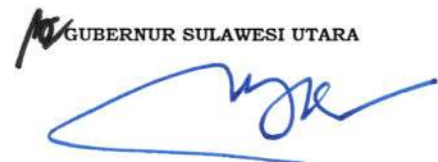
NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.02.02.5.2.2.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	372.800.000	2.700.700.000,00	3.073.500.000,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	1.825.552.621	2.269.024.315,00	4.094.576.936,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2	BELANJA MODAL	1.825.552.621	2.269.024.315,00	4.094.576.936,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.825.552.621	2.269.024.315,00	4.094.576.936,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.825.552.621	2.269.024.315,00	4.094.576.936,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.825.552.621	2.269.024.315,00	4.094.576.936,00	
JUMLAH PEN DINAS PERHUBUNGAN					4.969.724.315,00		
5	DINAS PARIWISATA DAERAH	3.26.3-26.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4.711.400.398	3.500.000.000,00	8.211.400.398,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2	BELANJA MODAL	3.919.694.000	3.500.000.000,00	7.419.694.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.806.631.000	3.500.000.000,00	6.306.631.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.386.231.000	1.800.000.000,00	3.186.231.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.386.231.000	1.800.000.000,00	3.186.231.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.02	Belanja Modal Monumen		1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti		1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
		3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.1.03.04.5.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Menara	1.420.400.000		1.420.400.000,00	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perencanaan-Undangan	Kiro
		

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.420.400.000	-	1.420.400.000,00	
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.113.063.000	-	1.113.063.000,00	
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.113.063.000	-	1.113.063.000,00	
		3.26 . 3-26.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 04 . 5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	1.113.063.000	-	1.113.063.000,00	
JUMLAH PEN DINAS PARIWISATA DAERAH					3.500.000.000,00		
6	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH	3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.778.419	195.000.000,00	344.778.419,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2	BELANJA MODAL	149.778.419	195.000.000,00	344.778.419,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.778.419	195.000.000,00	344.778.419,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.988.646	279.789.773,00	344.778.419,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.988.646	-	64.988.646,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Komputer	84.789.773	19.801.127,00	64.988.646	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Komputer Unit	62.727.273	22.062.500,00	84.789.773,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.062.500	40.664.773,00	62.727.273,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	22.062.500,00	22.062.500,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 01 . 1.07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	-	195.000.000,00	195.000.000,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	757.656.067	1.082.000.000,00	1.839.656.067,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	757.656.067	1.082.000.000,00	1.839.656.067,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	757.656.067	1.082.000.000,00	1.839.656.067,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	735.606.067	1.082.000.000,00	1.817.606.067,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	735.606.067	1.082.000.000,00	1.817.606.067,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	22.050.000	-	22.050.000,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 02 . 1.03 . 03 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.050.000	-	22.050.000,00	

Paraf Koordinasi : Biro Hukum
Kasubag Kabag. Perundang-Undangan Kro

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD TA.2021	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana				
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	743.014.373	620.360.000,00	1.363.374.373,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	743.014.373	620.360.000,00	1.363.374.373,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	743.014.373	620.360.000,00	1.363.374.373,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	722.129.373	620.360.000,00	1.342.489.373,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	722.129.373	620.360.000,00	1.342.489.373,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	20.885.000	-	20.885.000,00	
		3.29 . 3-29.0-00.0-00.01 . 06 . 1.06 . 06 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.885.000	-	20.885.000,00	
JUMLAH PEN DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH					1.897.360.000,00		

 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY